

**Analisis Indeks Skalogram Terbobot untuk Penentuan Sistem Hierarki Wilayah Di
Pulau Kalimantan Tahun 2022**

Herna Uli Manalu¹ , Muhammad Fauji²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan, Sumatera Utara,
Telp. (061) 6613365

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis penentuan sistem hierarki wilayah pada pulau Kalimantan tahun 2022. Metode yang digunakan adalah dengan mendidentifikasi ketersediaan fasilitas pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, serta ekonomi di lima provinsi pada pulau Kalimantan dengan menggunakan teknik analisis skalogram. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara termasuk dalam bagian hierarki 1 dengan ketersediaan fasilitas yang lengkap, sedangkan pada tiga provinsi lainnya teramsuk ke dalam hierarki 3 dengan ketersediaan fasilitas terendah. Ketimpangan ini tercermin dari nilai *Coefficient of Reducibility (COR)* sebesar 0.8, yang menunjukkan tingkat distribusi fasilitas sebesar 80% dan 20% sisanya merupakan ketimpangan yang terjadi. Penlitian ini juga menenkankan pentingnya perencanaan yang lebih terarah untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan pemerataan ketersediaan fasilitas dipulau Kalimantan.

Kata Kunci: analisis skalogram, sistem hierarki

PENDAHULUAN

Pulau Kalimantan, terdapat lima provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kelima provinsi ini memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda-beda, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Namun, di balik kekayaan alam tersebut, Pulau Kalimantan juga menghadapi tantangan yang kompleks, salah satunya adalah ketimpangan pembangunan antar provinsi. Ketimpangan ini tercermin dalam disparitas tingkat pendapatan, akses terhadap infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Ketimpangan pembangunan wilayah seringkali menjadi permasalahan yang serius karena berimplikasi terhadap kelancaran proses pembangunan. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada perbedaan kesejahteraan antar wilayah, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sjafrizal (2017),

ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah yang dapat disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam, kondisi geografis, dan mobilitas barang dan jasa.

Dalam konteks pembangunan wilayah, penentuan hierarki wilayah menjadi sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Menurut Rustiadi et al. (2018), analisis hierarki wilayah dapat membantu mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan. Metode Skalogram terbobot menjadi salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan hierarki wilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang ada di suatu wilayah.

Upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Pulau Kalimantan memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi dan potensi masing-masing wilayah. Tarigan (2019) menegaskan bahwa penentuan hierarki wilayah melalui analisis skalogram terbobot dapat menjadi instrumen yang efektif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami posisi dan peran

masing-masing wilayah dalam sistem perkotaan, diharapkan dapat disusun strategi pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkeadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian tentang analisis hierarki wilayah di Pulau Kalimantan menggunakan metode skalogram terbobot menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2016), penentuan hierarki wilayah dapat membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya pembangunan secara lebih efektif dan efisien, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.

KAJIAN TEORI

Teknik Analisis Skalogram

Analisis skalogram merupakan metode pengukuran tingkatan berdasarkan sebaran fasilitas dalam suatu wilayah, seperti pendidikan, kesehatan, dan jumlah penduduk. Metode ini mengelompokkan wilayah berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas yang tersedia. Nilai fasilitas ditentukan dalam format biner (1 jika ada, 0 jika tidak) dan dihitung untuk menentukan tingkat hierarki.

Analisis skalogram merupakan alat

analisis untuk menentukan pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan indikator fasilitas perkotaan. Tujuan utama analisis skalogram adalah untuk mengetahui kecamatan mana saja dalam suatu kabupaten/kota yang merupakan pusat pertumbuhan. Indikator yang digunakan dalam metode ini adalah fasilitas yang dimiliki dan dioperasikan oleh kecamatan. Fasilitas yang terdapat pada suatu wilayah menunjukkan ciri pembeda dan sentralitas suatu wilayah tertentu. Metode ini digunakan karena semakin beragam jenis fasilitas yang dimiliki suatu kecamatan, maka semakin tinggi kecenderungan untuk terkonsentrasi di kecamatan tersebut. Semakin banyak properti yang Anda miliki, semakin besar pula kapasitas yang dimiliki dan sebaliknya, Blakely & Leigh (2013).

Perhitungan menggunakan analisis skalogram memerlukan beberapa langkah langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis dan jumlah fasilitas di setiap kecamatan. fasilitas yang dipertimbangkan dalam perhitungan ini adalah lembaga pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk, ekonomi, dan penunjang. Pada tahap kedua, kecamatan yang memiliki fasilitas tertentu diberi angka 1, dan apabila pada kecamatan tersebut tidak tersedia fasilitas

tertentu maka diberi angka nol. Tahap ketiga adalah pembobotan dan penentuan indeks sentralitas. Langkah terakhir adalah menentukan hierarki tiap kecamatan berdasarkan indeks sentralitas.

Analisis skalogram ini mempunyai kelemahan yang artinya apabila suatu kecamatan mempunyai fasilitas tertentu dengan nilai 0 (nol) maka hanya diberi nilai atau poin 1 saja sehingga tidak diperhitungkan bobot dan pengaruh jumlah fasilitasnya. jika di kecamatan tidak ada fasilitas khusus (Zakiyah, 2019).

Analisis skalogram biasa digunakan untuk analisis pusat pembayaran khususnya hierarki dan pemesanan pusat pembayaran. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran pengelompokan pembayaran sebagai pusat layanan berdasarkan kelengkapan fungsionalitas layanan. Entitas yang digunakan dalam penilaian ini adalah entitas yang mengkarakterisasi fungsi pelayanan sosial dan ekonomi dengan menggunakan kriteria satu objek terukur, dan bila memungkinkan mempunyai karakteristik hierarki atau hierarki (Istiqomah, 2013).

Berikut langkah-langkah dalam teknik analisis skalogram yaitu:

- 1) Identifikasi fasilitas yaitu daftar

fasilitas yang tersedia di setiap wilayah. Seperti pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk dan lainnya.

- 2) Pembobotan setiap jenis fasilitas diberi nilai bobot berdasarkan kepentingannya bobot ini digunakan untuk menentukan nilai sentralitas pada masing-masing wilayah.
- 3) Penilaian kelayakan yang dilakukan dengan menghitung koefisien reproduksi (COR). Nilai $COR \geq 0,9$ menunjukkan analisis valid yang digunakan.
- 4) Distribusi kelas menggunakan metode sturges untuk menentukan jumlah kelas regional berdasarkan fasilitas yang tersedia.

Teknik analisis yang digunakan dalam analisis skalogram ini adalah dengan membuat tabel yang mengurutkan ketersediaan fasilitas pada wilayah yang teridentifikasi sebagai pusat pelayanan. Untuk menguji kelayakan skalogram digunakan persamaan koefisien reproduksi (COR). Apabila hasil perhitungan coefficient of reproducibility (COR) lebih besar dari 0,9, maka hasil perhitungan skalogram dapat diterima dan digunakan sebagai dasar analisis selanjutnya.

Menentukan pusat pertumbuhan wilayah dan aktivitas pelayanan untuk menguji kelayakan dapat menggunakan skalogram dengan rumus ***Coefficient of***

Reproducibility (COR) untuk menghitung skalogram adalah sebagai berikut.

$$COR = 1 - \frac{\sum e}{N \times K}$$

Keterangan:

e = Jumlah kesalahan atau eror

N = jumlah subjek atau wilayah yang diteliti

K = jumlah objek atau fasilitas yang diteliti

Dalam hal ini koefisien dianggap layak apabila bernilai $0,9 - 1$. dengan itu teknik analisis yang digunakan ketika $COR \geq 0,9$, hal ini menunjukkan bahwa data memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan model skala Guttman. Dengan kata lain, pola respons responden secara konsisten mencerminkan struktur hierarki yang diinginkan dalam skala tersebut. Menurut Guttman (1950), nilai COR sebesar $0,9$, atau lebih menunjukkan bahwa skalogram memiliki validitas yang memadai untuk digunakan dalam penelitian, karena jumlah error relatif kecil dibandingkan dengan total respons. Dalam situasi ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa skala yang digunakan sudah cukup baik dalam mengukur variabel yang dimaksud, dan hasil analisis dapat dianggap valid.

Sebaliknya, jika $COR < 0,9$, ini menunjukkan bahwa pola respons responden tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip kumulatif yang diharapkan dalam model Guttman. Error yang lebih tinggi

menunjukkan bahwa ada inkonsistensi dalam data, yang mungkin disebabkan oleh rancangan skala yang kurang efektif, kesalahpahaman responden terhadap item, atau variabel yang diukur tidak cocok untuk dianalisis dengan metode skalogram.

Langkah selanjutnya adalah menentukan bobot untuk setiap desa berdasarkan perhitungan di atas. Sebelum menentukan orde, kita perlu mengetahui kisaran masing-masing orde untuk menghitung orde yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$RANGE = \frac{Nilai Tertinggi - Nilai Terendah}{Jumlah Orde}$$

Sistem Hirarki

Sistem hirarki adalah struktur organisasi atau sistem sosial yang disusun dalam tingkatan atau lapisan berdasarkan otoritas, tanggung jawab, atau kepentingan tertentu. Dalam sistem ini, posisi tertinggi biasanya memiliki wewenang lebih besar dibandingkan dengan posisi yang lebih rendah, dan setiap tingkat memiliki hubungan yang saling terhubung dalam struktur tersebut. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti organisasi, manajemen, pendidikan, dan teknologi, karena menawarkan cara yang terstruktur untuk mengatur sumber daya

dan alur kerja.

Robinson Tarigan (2012) menyatakan bahwa sistem hierarki wilayah mewakili tingkat fungsionalitas wilayah sebagai akibat dari perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas fasilitas yang tersedia di wilayah tersebut. Di sisi lain, Imam Bukori dan Cristiana Dui Astuti (2015) berpendapat bahwa keputusan pusat kegiatan yang terhubung dengan kawasan sekitarnya tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pusat kegiatan tersebut. Dengan demikian, peran sarana dan prasarana dalam suatu wilayah terutama menentukan hierarki pusat (pusat kegiatan dalam suatu wilayah).

Sistem hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Maslow merupakan pola yang sering digunakan untuk mengkategorikan motivasi manusia.

Hirarki sistem kebutuhan mencakup lima kategori motivasi, disusun dari kebutuhan yang paling rendah yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dipenuhi (Wallace, Goldstein, Nathan, 2007: 277).

- 1) Kebutuhan fisiologis seperti makanan, air, tempat tinggal
- 2) Kebutuhan rasa aman perlindungan dari bahaya, ancaman, dan jaminan

keselamatan. Perilaku yang menimbulkan ketidakpastian terkait dengan kelangsungan pekerjaan, atau yang mencerminkan sikap, perbedaan, atau kebijakan pemerintah yang tidak dapat diprediksi, merupakan motivator yang sangat kuat dalam hal rasa aman pada setiap tahap hubungan kerja.

- 3) Kebutuhan sosial yaitu memberi dan menerima persahabatan, kasih sayang, harta benda, hubungan, dukungan. Setelah dua tingkat kebutuhan pertama terpenuhi, seseorang menjadi sadar akan perlunya kehadiran teman.
- 4) Kebutuhan harga diri yaitu keinginan untuk berprestasi, berhemat, berkuasa, kehormatan dan martabat. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan harga diri.
- 5) Keinginan aktualisasi diri kebutuhan untuk menyadari kemampuan diri untuk pengembangan diri lebih lanjut dan keinginan untuk menjadi semakin mampu.

Dalam organisasi, hierarki sering digunakan untuk menciptakan sistem

kontrol dan komunikasi yang jelas. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan, struktur hierarki memungkinkan para manajer puncak untuk membuat keputusan strategis, yang kemudian dilaksanakan oleh manajer tingkat menengah dan staf di tingkat operasional. Model ini memastikan bahwa tanggung jawab didelegasikan dengan jelas dan setiap individu memahami perannya dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu manfaat utama sistem hierarki adalah efisiensi operasional, karena memungkinkan pengambilan keputusan yang terpusat serta koordinasi yang lebih mudah.

Di sisi lain, hierarki juga dapat ditemukan dalam kehidupan sosial. Misalnya, dalam teori kebutuhan Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari kebutuhan fisiologis dasar seperti makanan dan tempat tinggal hingga kebutuhan tertinggi berupa aktualisasi diri. Model ini mencerminkan bahwa setiap individu memiliki prioritas yang berbeda pada tahap tertentu dalam hidup mereka.

Namun, sistem hierarki tidak luput dari kritik. Dalam beberapa kasus, struktur hierarki dapat menyebabkan birokrasi yang berlebihan, memperlambat proses pengambilan keputusan, atau menciptakan

kesenjangan kekuasaan yang merugikan tingkat bawah. Untuk mengatasi kelemahan ini, banyak organisasi modern mulai mengadopsi struktur yang lebih datar (flat organization), yang memungkinkan lebih banyak kolaborasi antar level.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan berupa data time series yang terbaru pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis informasi kuantitatif yang dapat diukur, diuji, dan diinterpretasikan melalui persamaan, tabel, dan lain sebagainya. Hasil analisis, pembahasan, serta kesimpulan penelitian ini disusun berdasarkan interpretasi mendalam terhadap data yang telah diolah dan dianalisis. Metode kuantitatif ini memungkinkan penyusunan kesimpulan yang kuat dan valid berdasarkan fakta-fakta yang terukur dan objektif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis skalogram dengan menganalisis struktur skalogram berdasarkan pola interaksi relasi antar

elemen atau posisi individu dalam jaringan skalogram. Teknik analisis ini bertujuan untuk menentukan hierarki pusat-pusat pengembangan serta sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan pembangunan di suatu wilayah.

HASIL

Analisis skalogram adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi calon wilayah yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan baru. Teknik ini berfokus pada ketersediaan berbagai fasilitas pelayanan, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dan pemerintahan, untuk menentukan wilayah dengan tingkat perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Metode ini bertujuan untuk menentukan hierarki pusat-pusat pengembangan serta sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan pembangunan di suatu wilayah. Penentuan hierarki pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan didasarkan pada jumlah jenis serta unit sarana-prasarana pembangunan yang tersedia dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan memanfaatkan analisis ini, Provinsi dapat dikelompokkan berdasarkan ketersediaan fasilitas yang dimilikinya, sehingga

mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai wilayah yang layak dijadikan pusat pertumbuhan. Hasil dari analisis skalogram kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menghitung indeks sentralitas dengan pembobotan tertentu, yang memberikan gambaran seberapa besar peranan masing-masing wilayah dalam mendukung pertumbuhan regional.

Dalam penelitian ini Pulau Kalimantan menjadi wilayah yang akan dianalisis, analisis skalogram diterapkan pada 5 provinsi untuk mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pelayanan di masing-masing wilayah. Pulau Kalimantan terdiri atas 5 provinsi dengan persebaran fasilitas yang berbeda-beda di setiap wilayah. Dalam analisis ini, terdapat 11 jenis fasilitas yang digunakan, termasuk fasilitas pendidikan seperti TK/RA sederajat, SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, SMA/MA sederajat, SMK sederajat; Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, polindes dan posyandu. Data yang dikumpulkan meliputi sebelas jenis fasilitas yang terdiri dari berbagai layanan dasar dan strategis.

Berdasarkan dari hasil analisis pada pulau Kalimantan, diketahui

bahwasannya dari 11 jenis fasilitas yang dianalisis, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara memiliki jumlah fasilitas tertinggi, yakni 10 jenis, yang mencerminkan tingkat penyediaan layanan yang lengkap dibandingkan 3 provinsi lainnya. Sebaliknya, provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan memiliki jumlah fasilitas terendah, yaitu hanya 8 jenis fasilitas. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam ketersediaan fasilitas antarprovinsi, yang dapat memengaruhi kemampuan provinsi-provinsi tersebut untuk menjadi pusat pertumbuhan. Provinsi yang memiliki fasilitas lebih lengkap cenderung memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Selain itu, juga dikaetahui bahwa jumlah kesalahan atau error pada penelitian ini sebanyak 11 dari 5 provinsi (N) dan 11

jenis fasilitas (F). Untuk melakukan analisis skalogram lebih lanjut, dapat menggunakan rumus perhitungan *Coefficient of Redreducibility* (COR).

$$(COR)COR = 1 - \frac{\sum e}{N \times K}$$

$$(COR)COR = 1 - \frac{11}{5 \times 11}$$

$$COR = 0,8$$

Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwasannya nilai *Coefficient of*

Redreducibility (COR) sebesar 0,8. Hal tersebut tentu saja menjelaskan bahwasannya tingkat fasilitas yang tersedia pada pulau Kalimantan masih terjadi ketimpangan pembangunan. Dimana dapat diketahui bahwa pembangunan fasilitas pada provinsi yang ada di Kalimantan sebesar 0,8 atau 80% sedangkan 20% lainnya adalah tingkat ketimpangan pada pembangunan yang ada di provinsi pada pulau Kalimantan.

Dengan memperhitungkan selisih perbandingan antara jumlah dari jenis fasilitas tertinggi dan terendah setiap provinsinya, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa pada provinsi yang ada di pulau Kalimantan dapat dikelompokkan kedalam 2 orde.

$$\text{Range} = (\text{jumlah tertinggi} - \text{jumlah terendah}) / \text{jumlah orde}$$

$$= (10 - 8) / 2$$

$$= 1$$

Tabel 1. Hasil Range Orde Skalogram

Orde	Range
Orde I	> 9 – 10
Orde II	> 7 – 8

Dari hasil analisis skalogram pada setiap provinsi yang ada dipulau

Kalimantan dapat diketahui bahwasannya Kelompok I merupakan provinsi dengan jumlah fasilitas tertinggi, yaitu provinsi Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara dengan memiliki 10 jenis fasilitas yang tersedia. Sedangkan Kelompok II merupakan provinsi dengan jumlah fasilitas terendah yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan dengan memiliki 8 jenis fasilitas yang tersedia.

Tabel 2. Hasil Tingkatan Orde

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk	Jumlah Jenis Fasilitas	Orde	Rata-rata	Standar Deviasi
1	Kalimantan Barat	5474.7	8	Orde II		
2	Kalimantan Timur	3803.5	8	Orde II		
3	Kalimantan Selatan	4116.9	8	Orde II		
4	Kalimantan Tengah	2700.1	10	Orde I		
5	Kalimantan Utara	727.8	10	Orde I		

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil dari analisis skalogram menunjukkan bahwa terdapat provinsi dengan jumlah penduduk terbesar namun dengan tingkat jenis fasilitas yang rendah. Oleh karena itu, untuk menentukan provinsi sebagai pusat pertumbuhan baru tidak cukup jika hanya dilihat dari jumlah jenis fasilitasnya, namun juga harus mempertimbangkan nilai frekuensi dari setiap jenis fasilitas yang ada. Hal tersebut dikarenakan tingkat frekuensi jenis

fasilitas dapat mempengaruhi indeks sentralitas dari provinsi tersebut.

Tabel 3. Hasil Analisis Indeks Skalogram

No.	Provinsi	Jumlah Jenis Fasilitas	Nilai IPD	Hierarki
1	Kalimantan Barat	8	12.67652697	Hierarki 3
2	Kalimantan Timur	8	10.9730057	Hierarki 3
3	Kalimantan Selatan	8	9.982216935	Hierarki 3
4	Kalimantan Tengah	10	16.58912863	Hierarki 1
5	Kalimantan Utara	10	15.66334231	Hierarki 1

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan dari hasil analisis pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwasannya provinsi yang dikelompokkan kedalam Hierarki 1 adalah provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Sedangkan provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Selatan masuk kedalam kategori Hierarki 3. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara merupakan provinsi yang memiliki daya tarik bagi masyarakat dikarenakan pada provinsi tersebut tersedia berbagai fasilitas ekonomi, sosial, serta

pemerintahan. Masyarakat yang datang ke provinsi tersebut dapat memperoleh berbagai kebutuhannya pada lokasi yang cukup berdekatan. Hal tersebut tentu saja menjadi day tarik dari provinsi tersebut untuk dikunjungi masyarakat sehingga dapat meningkatkan volume transaksi pada provinsi tersebut. Berikut ini adalah peta gambaran pulau Kalimantan berdasarkan persebaran sistem hierarkinya.



Gambar 1. Peta Gambaran Hasil Hierarki Pulau Kalimantan

PEMBAHASAN

Ketimpangan antarprovinsi di Pulau Kalimantan terlihat dari perbedaan ketersediaan fasilitas pelayanan, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan

ekonomi. Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara memiliki jumlah fasilitas yang lebih lengkap (10 jenis), sementara Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan hanya memiliki 8 jenis fasilitas. Hasil perhitungan menunjukkan tingkat kesesuaian ketersediaan fasilitas di Kalimantan hanya mencapai 80%, dengan 20% sisanya menunjukkan ketimpangan. Ini mencerminkan distribusi pembangunan yang tidak merata, yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan kesempatan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu.

Berdasarkan hasil analisis pada hierarki dan indeks skalogram, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara dikelompokkan ke dalam Hierarki 1, yang menunjukkan peran mereka sebagai pusat pertumbuhan di Pulau Kalimantan. Kedua provinsi ini memiliki daya tarik lebih tinggi karena keberadaan fasilitas yang lebih lengkap, sehingga mampu menyediakan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Sebaliknya, provinsi lainnya termasuk dalam Hierarki 3, mencerminkan daya dukung yang lebih rendah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayahnya.

Ketimpangan pembangunan antarprovinsi di Pulau Kalimantan dipengaruhi oleh berbagai faktor utama, diantaranya yaitu ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang tidak merata, di mana provinsi dengan fasilitas strategis yang lebih lengkap seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi memiliki kemampuan lebih baik dalam melayani kebutuhan penduduknya dibandingkan provinsi lain. Jumlah penduduk juga menjadi faktor penting, hal tersebut dikarenakan provinsi dengan jumlah penduduk yang tinggi tetapi fasilitas terbatas, seperti Kalimantan Barat, yang mana hal ini tentu saja menimbulkan tantangan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, kondisi geografis dan tingkat aksesibilitas juga menentukan kemampuan provinsi untuk menarik investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara optimal. faktor selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam hal alokasi sumber daya pembangunan yang kurang merata memperburuk kesenjangan ini, yang dapat mengakibatkan provinsi-provinsi tertentu tertinggal dalam aspek pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang berkeadilan melalui distribusi sumber daya yang lebih merata dan penguatan infrastruktur di wilayah-

wilayah yang masih tertinggal.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ketimpangan pembangunan antarprovinsi di Pulau Kalimantan masih menjadi masalah yang signifikan. Berdasarkan analisis skalogram yang telah dilakukan pada penelitian ini, diketahui Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara memiliki jumlah fasilitas tertinggi, sementara Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan memiliki fasilitas terendah. Ketimpangan ini, yang tercermin dari nilai Coefficient of Reproducibility sebesar 0,8, mengindikasikan bahwa distribusi pembangunan di pulau Kalimantan masih terjadi ketimpangan atau belum merata, yang mana hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan karena kelengkapan fasilitasnya, yang menarik aktivitas ekonomi dan sosial lebih besar dibandingkan provinsi

lainnya. Faktor-faktor seperti ketersediaan infrastruktur, jumlah penduduk, aksesibilitas geografis, dan kebijakan pemerintah menjadi penentu utama ketimpangan ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang strategis dan berbasis data untuk mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan.

SARAN

Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kerjasama dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan, khususnya dalam mengalokasikan sumber daya secara merata ke provinsi-provinsi dengan fasilitas terbatas. Upaya ini dapat mencakup pengembangan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas ke wilayah terpencil, penyediaan layanan dasar yang memadai, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan guna memastikan dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan antarprovinsi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2023*.

Kalimantan Barat: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2023*.
Kalimantan Timur: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2023*. Kalimantan Selatan: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023*. Kalimantan Tengah: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2023*.
Kalimantan Utara: BPS.

Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2013). *Planning local economic development*. Sage.

Istikhomah, A. A. et al. (2013) Analisa Sistem Pusat Pelayanan Pemukiman Di Kabupaten Magelang Dengan Analisa SKalogram Dan Indeks Sentraitas Marshall.

Kasikoen, K. M. (2018). Analisis Index Centralitas Terbobot Untuk Penentuan Sistem Hirarki Wilayah. University Esa Unggul, (978-623), 6566-20.

Maslow, Abraham H., 1954. *Motivation and Personality*. New York: Harper and Bros.

Mutaqin, Z., Musiyam, M., & TP, M. (2022). Perkembangan

- Permukiman Dan Pusat Pelayanan Berdasarkan Ketersediaan Fasilitas Sosial Ekonomi Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Dan Tahun 2019 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nurhidayani, A. F., Osly, P. J., & Ihsani, I. (2018). Hubungan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Desa Di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. *Jurnal Infrastruktur*, 4(2), 97-104.
- Riyadi & Bratakusumah, D. S. (2016). Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sanjaya, L. R., Soetarto, E., & Pravitasari, A. E. (2019). Ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah (kajian pada kabupaten Kotawaringin Timur dan pemekarannya). *Jurnal TATALOKA*, 21(2), 254-266.
- Sjafrizal. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tarigan, Robinson. 2012. Perencanaan Pembangunan Wilayah (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Zakiyah, (2019). Implementasi pendekatan kontekstual pada model pembelajaran berbasis masalah berdasarkan langkah-langkah polya. *Teorema: Teori dan Riset Matematika*, 4(2), 111-120